



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 154/M.PPN/HK/12/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 67/M.PPN/HK/06/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/06/2023 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam perkembangannya terdapat usulan baru proyek infrastruktur dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang belum ditetapkan dalam Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023;
 - c. bahwa usulan proyek infrastruktur baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk ditetapkan dalam perubahan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023;
 - d. bahwa Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha diperbaharui secara berkala untuk diumumkan dan disebarluaskan kepada masyarakat atas usulan dan identifikasi berdasarkan prioritas pembangunan serta perkembangan yang ada;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengubah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/06/2023 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.67/M.PPN/HK/06/2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2023.
- PERTAMA : Menambahkan proyek dalam Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.67/M.PPN/HK/06/2023 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023.
- KEDUA : Tambahan proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.67/M.PPN/HK/06/2023 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2023 dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 154/M.PPN/HK/12/2023
TANGGAL 18 DESEMBER 2023

TAMBAHAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2023

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI SIAP
DITAWARKAN

1. Bandar Udara Singkawang.
2. Revitalisasi dan Pembangunan Alat Penerangan Jalan Kota Denpasar.

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM PROSES
PENYIAPAN

1. Kereta Api Prabumulih - Tarahan, Sumatera Selatan.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 20 MW pada Bendungan Leuwikeris.
3. SPAM Sepaku Semoi di Kota Balikpapan
4. Jalan Tol Dalam Kota Bandung (*Bandung Intra Urban Toll Road/ BIUTR*).
5. Jalan Tol Samarinda - Bontang.
6. Jalan Tol Cibadak - Pelabuhan Ratu.
7. Jalan Tol Bandara Supadio - Pelabuhan Kijing.
8. Jalan Tol Lingkar Timur - Selatan Kota Surakarta.
9. Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi.
10. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya-Ciamis.
11. *Fly Over* Sitingau Lauik.
12. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.
13. Revitalisasi Pasar Induk Gadarata Singasana Kabupaten Tabanan.

TAMBAHAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
IBU KOTA NUSANTARA TAHUN 2023

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA IBU KOTA NUSANTARA
KATEGORI SIAP DITAWARKAN

~

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA IBU KOTA NUSANTARA
KATEGORI DALAM PROSES PENYIAPAN

1. Rusun Hankam di WP 1A dan Rusun ASN di WP 1B KIPP IKN.
2. Jalan Tol Akses IKN-Balikpapan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati